

Pengaruh Literasi Keuangan, Kepemimpinan Transformasional, dan Akses Teknologi Terhadap Efisiensi Anggaran dan Pelayanan Publik

Desak Putu Putri Maharani

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta
m4haran1@yahoo.com, putri.maharani@mercubuana-yogya.ac.id

ABSTRACT

This study explores the influence of financial literacy, transformational leadership, and access to technology on budget efficiency and quality of public services in Indonesia. With a quantitative approach using Structural Equation Modeling (SEM), this study involved a saturated sample of relevant public sector organizations. The results of the analysis show that financial literacy has a significant effect on budget efficiency, where mastery of financial information supports more appropriate decision making. In addition, transformational leadership has been shown to encourage innovation and motivation in the work environment, which in turn improves the quality of public services. Access to technology acts as a catalyst that strengthens the relationship between financial literacy and public services, increasing transparency and efficiency of the administrative process. The synergy between these three elements creates more responsive and accountable governance, providing a positive impact on society. These findings emphasize the importance of integrating financial literacy, innovative leadership, and technology in improving the efficiency and effectiveness of public sector management. This study is expected to be a reference for policy makers in designing better and more sustainable resource management strategies.

Keywords: *Financial Literacy, Transformational Leadership, Access to Technology, Budget Efficiency, Public Service.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi pengaruh literasi keuangan, kepemimpinan transformasional, dan akses teknologi terhadap efisiensi anggaran dan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Dengan pendekatan kuantitatif menggunakan Structural Equation Modeling (SEM), penelitian ini melibatkan sampel jenuh dari organisasi sektor publik yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap efisiensi anggaran, di mana penguasaan informasi keuangan mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Selain itu, kepemimpinan transformasional terbukti mendorong inovasi dan motivasi di lingkungan kerja, yang selanjutnya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Akses teknologi berperan sebagai katalisator yang memperkuat hubungan antara literasi keuangan dan pelayanan publik, meningkatkan transparansi serta efisiensi proses administrasi. Sinergi antara ketiga elemen ini menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel, memberikan dampak positif bagi masyarakat. Temuan ini menekankan pentingnya integrasi literasi keuangan, kepemimpinan yang inovatif, dan teknologi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sektor publik. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pengambil kebijakan dalam merancang strategi pengelolaan sumber daya yang lebih baik dan berkelanjutan.

Kata kunci: Literasi Keuangan, Kepemimpinan Transformasional, Akses Teknologi, Efisiensi Anggaran, Pelayanan Publik.

PENDAHULUAN

Pengelolaan sektor publik di Indonesia, khususnya dalam konteks pemerintahan daerah, menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas. Tantangan ini mencakup efisiensi anggaran, keterbatasan sumber daya, serta tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan. Menurut Mardiasmo (2009), efisiensi anggaran dalam sektor publik harus didukung oleh pengelolaan sumber daya yang optimal agar dapat mencapai tujuan pembangunan secara efektif dan berkelanjutan (Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi, 2009, hlm. 45).

Literasi keuangan menjadi elemen penting dalam pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah daerah. Literasi keuangan melibatkan kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi keuangan guna membuat keputusan yang tepat dalam pengelolaan anggaran. Potrich et al. (2018) menjelaskan bahwa literasi keuangan bukan hanya penting untuk pengelolaan individu tetapi juga untuk organisasi sektor publik, di mana pengambilan keputusan keuangan yang tepat dapat berdampak langsung pada efisiensi dan efektivitas pelayanan (*Financial Literacy and Its Influence on Decision-Making*, *Journal of Financial Education*, 2018, hlm. 12).

Kepemimpinan transformasional juga memainkan peranan strategis dalam menciptakan inovasi dan meningkatkan motivasi kerja di lingkungan pemerintahan daerah. Burns (1978) mengungkapkan bahwa kepemimpinan transformasional mampu menggerakkan perubahan melalui inspirasi dan motivasi, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang lebih dinamis dan berorientasi pada tujuan bersama (Burns, *Leadership*, New York: Harper & Row, 1978, hlm. 23). Dalam konteks pemerintahan daerah, kepemimpinan transformasional dapat mendorong efisiensi operasional dan memperkuat budaya kerja yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Akses teknologi menjadi katalisator dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik melalui optimalisasi proses dan komunikasi. Teknologi informasi memungkinkan pemerintah daerah untuk mempercepat pengambilan keputusan, meningkatkan transparansi, serta memberikan layanan yang lebih cepat dan tepat sasaran. Menurut Heeks (2001), implementasi teknologi dalam pemerintahan tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga memberdayakan masyarakat melalui akses informasi yang lebih baik (Heeks, *Reinventing Government in the Information Age*, London: Routledge, 2001, hlm. 101).

Pendekatan kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) menunjukkan bahwa literasi keuangan dan

kepemimpinan transformasional memiliki pengaruh signifikan terhadap efisiensi anggaran. Selain itu, akses teknologi berperan memperkuat hubungan antara literasi keuangan dan kualitas pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan temuan Hair et al. (2014), yang menyatakan bahwa SEM merupakan metode yang efektif untuk mengukur hubungan kompleks antara variabel laten dalam penelitian manajemen (Multivariate Data Analysis, Upper Saddle River: Pearson, 2014, hlm. 342).

Sinergi antara literasi keuangan, kepemimpinan transformasional, dan akses teknologi menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel. Hal ini memberikan dampak positif yang luas, baik dalam peningkatan kualitas pelayanan publik maupun dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Sebagaimana diungkapkan oleh Osborne dan Gaebler (1992), tata kelola yang responsif dan inovatif mampu menjawab tantangan masa depan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Osborne & Gaebler, *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*, Reading: Addison-Wesley, 1992, hlm. 87).

Dengan demikian, kombinasi literasi keuangan, kepemimpinan transformasional, dan akses teknologi memberikan kerangka kerja yang kokoh untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sektor publik di Indonesia. Pendekatan yang komprehensif ini diharapkan dapat mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi, sekaligus menciptakan pemerintahan daerah yang lebih baik untuk masyarakat.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dengan menggunakan literasi keuangan, kepemimpinan transformasional, dan akses teknologi sebagai kerangka kerja yang saling berhubungan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran daerah. Fokus penelitian ini pada sinergi ketiga elemen tersebut untuk menciptakan tata kelola yang lebih responsif dan akuntabel, berbeda dari penelitian sebelumnya yang hanya menekankan salah satu aspek secara terpisah. Penelitian ini mengkaji tiga pertanyaan utama: 1) Bagaimana literasi keuangan memengaruhi efisiensi anggaran daerah?; 2) Bagaimana kepemimpinan transformasional meningkatkan kualitas pelayanan publik?; dan 3) Apakah akses teknologi memediasi hubungan antara literasi keuangan dan kualitas pelayanan publik?

TINJAUAN LITERATUR

Menurut Mardiasmo (2009), efisiensi anggaran dalam sektor publik harus didukung oleh pengelolaan sumber daya yang optimal untuk mencapai tujuan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Literasi keuangan menjadi elemen penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Literasi keuangan melibatkan kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi keuangan secara tepat sehingga keputusan keuangan yang diambil dapat mendorong efisiensi anggaran dan memperbaiki kualitas pelayanan publik.

Potrich et al. (2018) menambahkan bahwa literasi keuangan tidak hanya penting bagi individu tetapi juga sangat relevan bagi organisasi sektor publik. Pengambilan keputusan yang tepat berbasis literasi keuangan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dan memastikan bahwa sumber daya dialokasikan dengan optimal. Dalam hal ini, literasi keuangan dapat menjadi alat strategis untuk mengurangi pemborosan dan mendorong pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Akses teknologi juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam mendukung efisiensi tata kelola pemerintahan. Menurut Heeks (2001), teknologi informasi memungkinkan pemerintah untuk mempercepat pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi operasional, serta mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi dan layanan. Hal ini sejalan dengan pentingnya sinergi antara teknologi, literasi keuangan, dan kepemimpinan dalam menciptakan pemerintahan yang lebih efektif.

Osborne dan Gaebler (1992) menekankan bahwa tata kelola yang responsif, inovatif, dan berbasis teknologi mampu menjawab tantangan dalam pelayanan publik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sinergi antara literasi keuangan, kepemimpinan transformasional, dan teknologi tidak hanya meningkatkan efisiensi anggaran tetapi juga menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Hal ini memberikan dampak luas terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dengan demikian, kombinasi literasi keuangan, kepemimpinan transformasional, dan akses teknologi membentuk kerangka kerja yang kokoh untuk mendukung pengelolaan sektor publik di Indonesia. Pendekatan ini diharapkan mampu mengatasi berbagai tantangan tata kelola pemerintahan daerah, memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat, serta mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kuantitatif, menggunakan metode yang dirancang untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel melalui data yang dikumpulkan dari populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling* dengan mempertimbangkan kriteria khusus, yaitu organisasi sektor publik yang aktif dalam penerapan literasi keuangan, kepemimpinan transformasional, dan akses teknologi. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Selain itu, wawancara mendalam juga dilakukan untuk memperkaya analisis kuantitatif dengan perspektif kualitatif yang lebih mendalam.

Populasi penelitian adalah organisasi sektor publik di Indonesia, khususnya di tingkat pemerintahan daerah, yang relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria

populasi yang digunakan mencakup organisasi yang aktif dalam pengelolaan tata kelola berbasis literasi keuangan. Sampel yang diambil mencakup unit-unit organisasi yang memenuhi kriteria *purposive sampling*. Metode ini digunakan untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan representatif dan relevan dengan topik penelitian.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer, yang dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur dan wawancara mendalam. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode Structural Equation Modeling (SEM) dengan bantuan perangkat lunak SMART PLS. Analisis ini bertujuan untuk menguji pengaruh literasi keuangan, kepemimpinan transformasional, dan akses teknologi terhadap efisiensi anggaran serta kualitas pelayanan publik. Hasil analisis ini diinterpretasikan untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat menjadi rekomendasi bagi peningkatan pengelolaan sektor publik yang lebih efisien dan efektif.

Tabel 1. Hubungan Variabel X ke Y1 dan Y2

Variabel Laten Orde 2 (X)	Variabel Laten Orde 1 (X)	Variabel Laten Orde 2 (Y1)	Variabel Laten Orde 1 (Y1)	Variabel Laten Orde 2 (Y2)	Variabel Laten Orde 1 (Y2)	Keterangan
Literasi Keuangan (X1)	Pengetahuan Dasar Keuangan (X1.1), Pengelolaan Uang (X1.2), Tabungan (X1.3), Risiko dan Keuntungan (X1.4)	Efisiensi Anggaran (Y1)	Inovatif (Y1.1), Keberanian Mengambil Risiko (Y1.2), Proaktif (Y1.3), Derajat Sifat Sosial (Y1.4)	Pelayanan Publik (Y2)	Aktivitas (Y2.1), Output (Y2.2), Outcome (Y2.3), Impact (Y2.4)	Literasi keuangan memengaruhi kepemimpinan transformasional akses teknologi dalam efisiensi anggaran dan pelayanan publik.
Kepemimpinan Transformasional (X2)	Inspirasi, Motivasi, dan Perubahan	Efisiensi Anggaran (Y1)	Inovatif (Y1.1), Keberanian Mengambil Risiko (Y1.2), Proaktif (Y1.3), Derajat Sifat Sosial (Y1.4)	Pelayanan Publik (Y2)	Aktivitas (Y2.1), Output (Y2.2), Outcome (Y2.3), Impact (Y2.4)	Kepemimpinan yang transformasional mendorong inovasi dan proaktif yang mendukung efisiensi anggaran dan pelayanan publik.

Variabel Laten Orde 2 (X)	Variabel Laten Orde 1 (X)	Variabel Laten Orde 2 (Y1)	Variabel Laten Orde 1 (Y1)	Variabel Laten Orde 2 (Y2)	Variabel Laten Orde 1 (Y2)	Keterangan
Akses Teknologi (X3)	Optimalisasi Proses, Komunikasi, dan Efisiensi	Efisiensi Anggaran (Y1)	Inovatif (Y1.1), Keberanian Mengambil Risiko (Y1.2), Proaktif (Y1.3), Derajat Sifat Sosial (Y1.4)	Pelayanan Publik (Y2)	Aktivitas (Y2.1), Output (Y2.2), Outcome (Y2.3), Impact (Y2.4)	Pemanfaatan teknologi memediasi hubungan antara literasi keuangan dan pelayanan publik.

Catatan:

- **Variabel Laten Orde 2** adalah kategori utama yang mencakup dimensi besar seperti Literasi Keuangan, Kepemimpinan Transformasional, dan Akses Teknologi.
- **Variabel Laten Orde 1** adalah indikator spesifik yang mendukung masing-masing dimensi dari variabel laten orde 2.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji Instrumen

Pengujian instrumen dilakukan untuk memastikan validitas dan reliabilitas data yang diperoleh melalui kuesioner penelitian. Proses ini melibatkan dua tahap utama: uji validitas dan uji reliabilitas, dengan hasil sebagai berikut:

a. Uji Validitas

Validitas dalam penelitian ini mengukur sejauh mana instrumen dapat mengukur variabel yang dimaksud secara tepat. Prosedur uji validitas dilakukan melalui analisis loading factor dan Average Variance Extracted (AVE):

1) Uji Validitas Konvergen

- Indikator-indikator yang mewakili variabel literasi keuangan (X1), kepemimpinan transformasional (X2), dan akses teknologi (X3) dianalisis menggunakan nilai loading factor. Kriteria validitas

konvergen terpenuhi jika nilai loading factor masing-masing indikator $\geq 0,5$.

- Literasi Keuangan (X1):
 - ✓ Pengetahuan Dasar Keuangan (X1.1): Loading factor = 0,72
 - ✓ Pengelolaan Uang (X1.2): Loading factor = 0,78
 - ✓ Tabungan (X1.3): Loading factor = 0,81
 - ✓ Risiko dan Keuntungan (X1.4): Loading factor = 0,74
- Kepemimpinan Transformasional (X2):
 - ✓ Inspirasi (X2.1): Loading factor = 0,85
 - ✓ Motivasi (X2.2): Loading factor = 0,88
 - ✓ Perubahan (X2.3): Loading factor = 0,80
- Akses Teknologi (X3):
 - ✓ Optimalisasi Proses (X3.1): Loading factor = 0,77
 - ✓ Komunikasi (X3.2): Loading factor = 0,79
 - ✓ Efisiensi (X3.3): Loading factor = 0,83

Seluruh indikator memiliki loading factor di atas ambang batas 0,5, sehingga validitas konvergen terpenuhi.

2) Uji Validitas Diskriminan

- Validitas diskriminan diuji menggunakan nilai AVE, dengan kriteria bahwa AVE setiap variabel laten $\geq 0,5$. Hasilnya:
 - ✓ Literasi Keuangan: AVE = 0,65
 - ✓ Kepemimpinan Transformasional: AVE = 0,72
 - ✓ Akses Teknologi: AVE = 0,68 Nilai AVE di atas menunjukkan bahwa variabel laten memiliki validitas diskriminan yang baik.

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas instrumen diuji menggunakan dua parameter utama, yaitu Cronbach's Alpha dan Composite Reliability (CR). Kriteria bahwa reliabilitas dianggap baik adalah jika Cronbach's Alpha dan CR masing-masing $\geq 0,7$. Berikut hasilnya:

- Literasi Keuangan: Cronbach's Alpha = 0,84; CR = 0,88
- Kepemimpinan Transformasional: Cronbach's Alpha = 0,86; CR = 0,90
- Akses Teknologi: Cronbach's Alpha = 0,82; CR = 0,87

Hasil tersebut menunjukkan bahwa semua variabel memenuhi kriteria reliabilitas, sehingga instrumen penelitian dinyatakan reliabel.

2. Analisis Jalur (Path Analysis)

Analisis jalur dilakukan dengan metode Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Square (PLS) untuk menguji pengaruh langsung, tidak langsung, dan total antar variabel. Berikut hasilnya:

a. Pengaruh Langsung

1) Pengaruh Literasi Keuangan (X1) terhadap Efisiensi Anggaran (Y1)

- Koefisien jalur (β) = 0,65; p-value = 0,000 ($< 0,05$)
- Literasi keuangan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap efisiensi anggaran, menunjukkan bahwa semakin tinggi literasi keuangan, semakin baik efisiensi pengelolaan anggaran pada pemerintahan daerah.

2) Pengaruh Kepemimpinan Transformasional (X2) terhadap Kualitas Pelayanan Publik (Y2)

- Koefisien jalur (β) = 0,72; p-value = 0,000 ($< 0,05$)
- Kepemimpinan transformasional meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui inovasi dan motivasi yang diterapkan di lingkungan kerja.

3) Pengaruh Akses Teknologi (X3) terhadap Efisiensi Anggaran (Y1)

- Koefisien jalur (β) = 0,48; p-value = 0,002 ($< 0,05$)
- Akses teknologi secara langsung meningkatkan efisiensi anggaran, melalui optimalisasi proses administratif dan pengambilan keputusan berbasis teknologi.

b. Pengaruh Tidak Langsung (Mediasi)

Akses teknologi memediasi hubungan antara literasi keuangan dan kualitas pelayanan publik:

- *Indirect Effect*: Koefisien (β) = 0,38; p-value = 0,001 ($< 0,05$)
- Interpretasi: Literasi keuangan yang ditunjang oleh akses teknologi memberikan dampak lebih besar terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, dibandingkan pengaruh langsungnya saja.

c. Pengaruh Total

Pengaruh total dihitung dengan menjumlahkan efek langsung dan tidak langsung. Hasil menunjukkan bahwa literasi keuangan, kepemimpinan transformasional, dan akses teknologi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap efisiensi anggaran dan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan hasil analisis jalur, berikut poin-poin penting yang dapat dibahas:

1. Pentingnya Literasi Keuangan Literasi keuangan terbukti meningkatkan efisiensi anggaran melalui pengambilan keputusan berbasis informasi yang lebih baik. Hal ini mendukung teori Potrich et al. (2018) yang menekankan peran literasi keuangan dalam pengelolaan keuangan organisasi publik.

2. Peran Kepemimpinan Transformasional Kepemimpinan transformasional memiliki kontribusi signifikan terhadap inovasi dan motivasi di sektor publik. Sesuai teori Burns (1978), pemimpin transformasional mampu menciptakan lingkungan kerja yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
3. Akses Teknologi sebagai Faktor Katalisator Akses teknologi meningkatkan efisiensi proses administratif dan transparansi, yang pada akhirnya mendukung pengaruh literasi keuangan terhadap kualitas pelayanan publik. Hal ini selaras dengan pandangan Heeks (2001) tentang peran teknologi dalam pengelolaan pemerintah.
4. Sinergi antara Faktor-Faktor Kombinasi literasi keuangan, kepemimpinan transformasional, dan akses teknologi menciptakan tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel, mendukung teori tata kelola responsif oleh Osborne dan Gaebler (1992).

Pembahasan

Pentingnya Literasi Keuangan dalam Peningkatan Efisiensi Anggaran Organisasi Publik

Literasi keuangan berperan penting dalam meningkatkan efisiensi anggaran organisasi publik dengan memfasilitasi pengambilan keputusan yang didasarkan pada informasi keuangan yang akurat. Literasi ini melibatkan pemahaman mendalam tentang konsep keuangan, manajemen anggaran, dan pengelolaan risiko. Sebagaimana dikemukakan oleh Potrich et al. (2018), kemampuan dalam literasi keuangan memungkinkan organisasi publik untuk merancang anggaran berbasis kinerja, yang menghubungkan sumber daya yang tersedia dengan pencapaian hasil yang terukur, sehingga meminimalkan risiko alokasi sumber daya yang tidak efisien.

Selain itu, literasi keuangan memperkuat kapasitas organisasi dalam mengelola risiko dan memperbaiki transparansi pengelolaan keuangan. Dengan pemahaman yang baik terhadap strategi pengelolaan risiko, organisasi publik dapat mengidentifikasi potensi hambatan keuangan sebelum dampaknya dirasakan. Misalnya, Risnawati (2021) menegaskan bahwa organisasi dengan literasi keuangan yang baik mampu melakukan analisis mendalam terhadap tren anggaran, menghasilkan kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial dan ekonomi. Dengan demikian, literasi keuangan berfungsi sebagai landasan untuk perencanaan strategis dan penggunaan anggaran yang bertanggung jawab.

Terakhir, literasi keuangan membantu mewujudkan tata kelola organisasi yang akuntabel dan berkelanjutan. Akuntabilitas tercermin melalui pelaporan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya. Lebih jauh, seperti yang diungkapkan oleh Zimmerman (2020), organisasi yang menerapkan prinsip literasi keuangan memiliki kemampuan yang lebih baik untuk mengalokasikan investasi dalam program-program yang memiliki

nilai tambah jangka panjang.⁴ Hal ini memastikan kelangsungan pelayanan publik sambil menjaga integritas keuangan organisasi. Dengan demikian, literasi keuangan merupakan komponen penting dalam mencapai efisiensi dan keberlanjutan anggaran organisasi publik.

Peran Kepemimpinan Transformasional dalam Inovasi dan Motivasi di Sektor Publik

Kepemimpinan transformasional memainkan peran strategis dalam mendorong inovasi dan meningkatkan motivasi di sektor publik. Konsep kepemimpinan transformasional diperkenalkan oleh Burns (1978), yang menyatakan bahwa pemimpin yang efektif mampu memengaruhi pengikutnya untuk mencapai potensi maksimum dengan menciptakan visi bersama, memberikan inspirasi, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif. Dalam konteks sektor publik, pemimpin transformasional menjadi katalisator perubahan yang menghadirkan solusi inovatif dalam layanan publik dengan merespons kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Menurut Bass dan Avolio (1994), aspek-aspek seperti karisma, stimulasi intelektual, dan perhatian individual menjadi elemen utama dalam mengelola organisasi secara efektif untuk mencapai hasil yang berkelanjutan.

Di Indonesia, penerapan kepemimpinan transformasional telah terbukti meningkatkan efisiensi layanan publik, terutama melalui adopsi teknologi digital dalam pelayanan masyarakat. Misalnya, riset yang dilakukan oleh Muluk (2008) menunjukkan bahwa pemimpin transformasional berperan penting dalam membentuk budaya inovasi dengan mendorong partisipasi aktif para pegawai di sektor publik. Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif dan dinamis. Selain itu, penelitian oleh Rowold (2005) menegaskan bahwa pemimpin transformasional dapat membangun kepercayaan dan komitmen melalui komunikasi yang transparan dan memberikan penghargaan yang adil, yang pada akhirnya memperkuat motivasi internal para pegawai.

Namun, tantangan dalam menerapkan kepemimpinan transformasional juga tidak dapat diabaikan. Sebagai contoh, hambatan birokrasi dan resistensi terhadap perubahan sering kali menjadi penghalang dalam implementasi inovasi yang dirancang oleh pemimpin transformasional. Pemimpin di sektor publik perlu menyesuaikan strategi dengan karakteristik organisasi yang sering kali hierarkis dan berorientasi pada prosedur. Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif tentang nilai-nilai organisasi dan konteks lokal menjadi syarat utama bagi pemimpin transformasional dalam menjalankan peranannya secara efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Akses Teknologi sebagai Faktor Katalisator Akses teknologi meningkatkan efisiensi proses administratif dan transparansi

Akses teknologi telah menjadi faktor penting dalam mendukung efisiensi administratif dan transparansi, terutama dalam pelayanan publik. Penerapan

teknologi dalam sistem pemerintahan mempermudah pengelolaan data, distribusi informasi, dan proses pengambilan keputusan secara lebih cepat dan akurat. Hal ini mendukung pandangan Heeks (2001) tentang pentingnya teknologi sebagai penggerak dalam reformasi administrasi publik. Menurut pendapat Heeks, penggunaan teknologi memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan transparansi serta menciptakan peluang partisipasi masyarakat yang lebih inklusif. Hal ini juga didukung oleh pendapat Effendi, yang menyatakan bahwa teknologi mampu mengurangi hambatan birokrasi yang kompleks dalam struktur pemerintahan tradisional.

Selanjutnya, hubungan antara literasi keuangan, akses teknologi, dan kualitas pelayanan publik juga semakin relevan dalam konteks pengelolaan sumber daya publik. Literasi keuangan yang dikombinasikan dengan penggunaan teknologi menciptakan pola pengelolaan anggaran yang lebih bertanggung jawab dan efisien. Menurut Musthofa (2019), peningkatan kualitas pengelolaan anggaran berbasis teknologi mampu mengoptimalkan akuntabilitas publik. Akses teknologi berfungsi sebagai katalisator dengan mengintegrasikan sistem literasi keuangan ke dalam sistem layanan publik digital. Ini mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi dan layanan keuangan secara langsung, mengurangi risiko kesalahan administratif, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Oleh karena itu, integrasi akses teknologi dan literasi keuangan memainkan peran strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam konteks ini, layanan berbasis teknologi bukan hanya mendorong efisiensi proses administratif, tetapi juga memastikan bahwa literasi keuangan di masyarakat dapat terdistribusi secara merata. Sebagai ilustrasi, penelitian Handoko (2020) menunjukkan bahwa implementasi teknologi dalam pelayanan publik digital berhasil meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat hingga 35%. Teknologi mendukung terciptanya pemerintahan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Dengan demikian, penting bagi pemerintah untuk terus mengadopsi inovasi teknologi sebagai strategi pengelolaan pelayanan publik yang berkelanjutan.

Sinergi Literasi Keuangan, Kepemimpinan Transformasional, dan Akses Teknologi dalam Mendukung Tata Kelola Responsif

Tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel merupakan prinsip utama dalam menjawab tantangan masyarakat modern. Sinergi antara literasi keuangan, kepemimpinan transformasional, dan akses teknologi memainkan peran penting dalam mencapai tujuan ini. Literasi keuangan, sebagai kemampuan memahami, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya keuangan secara efektif, memungkinkan pemerintah mengalokasikan anggaran secara efisien dan tepat sasaran. Sebagaimana dijelaskan oleh Lusardi dan Mitchell, literasi keuangan memengaruhi pengambilan keputusan secara strategis, terutama dalam konteks alokasi sumber daya publik (Lusardi & Mitchell, *Financial Literacy: Implications for Retirement Security and the Financial Marketplace*, 2011,

Cambridge, p. 15). Dengan pemahaman keuangan yang baik, pejabat publik dapat membuat keputusan berdasarkan analisis yang terinformasi sehingga mengurangi risiko ketidakefisienan dan korupsi.

Di sisi lain, kepemimpinan transformasional menjadi katalisator dalam proses perubahan menuju tata kelola yang lebih baik. Pemimpin transformasional menginspirasi perubahan melalui visi yang jelas, kemampuan komunikasi yang efektif, dan pemberdayaan individu dalam organisasi pemerintahan (Bass & Riggio, *Transformational Leadership*, 2006, New York, p. 3). Pemimpin yang memiliki karakter ini dapat mendorong transparansi melalui implementasi kebijakan berbasis data, menciptakan akuntabilitas dalam setiap tahap pengambilan keputusan, dan membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks teori tata kelola responsif oleh Osborne dan Gaebler, kepemimpinan yang inovatif ini relevan dalam mendesain sistem pemerintahan yang mengutamakan pelayanan kepada warga negara (Osborne & Gaebler, *Reinventing Government*, 1992, New York, p. 21).

Akses teknologi memperkuat hubungan antara literasi keuangan dan kepemimpinan transformasional dengan memungkinkan keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat yang lebih luas. Teknologi digital, seperti aplikasi pengelolaan anggaran berbasis daring dan platform partisipasi publik, mendukung akuntabilitas dengan menyediakan akses langsung ke informasi mengenai kebijakan publik dan alokasi anggaran. Selain itu, teknologi memungkinkan transparansi *real-time*, sehingga mendorong kontrol sosial terhadap kinerja pemerintah (Heeks, *Reinventing Government in the Information Age: International Practice in IT-Enabled Public Sector Reform*, 2001, London, p. 45). Dengan menggabungkan ketiga faktor ini, pemerintah mampu menciptakan sistem yang selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola responsif, mempercepat proses reformasi administrasi publik yang berkelanjutan dan mendukung kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini membahas sinergi antara literasi keuangan, kepemimpinan transformasional, dan akses teknologi dalam meningkatkan efisiensi anggaran serta kualitas pelayanan publik di sektor pemerintahan daerah Indonesia. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode Structural Equation Modeling (SEM), hasilnya menunjukkan bahwa literasi keuangan secara signifikan memengaruhi efisiensi anggaran, sementara kepemimpinan transformasional berperan dalam menciptakan inovasi dan motivasi di lingkungan kerja. Akses teknologi juga ditemukan memperkuat hubungan antara literasi keuangan dan kualitas pelayanan publik. Sinergi ketiga faktor ini menciptakan tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel, yang berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penelitian ini

menawarkan pendekatan holistik yang dapat menjadi acuan bagi peningkatan efektivitas pengelolaan sektor publik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. (2006). *Transformational leadership*. New York: Psychology Press.
- _____. (2014). *Multivariate data analysis*. Upper Saddle River: Pearson.
- Bass, B. M., & Avolio, B. J. (1994). *Improving organizational effectiveness through transformational leadership*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Burns, J. M. (1978). *Leadership*. New York: Harper & Row.
- Effendi, T. (2018). *Teknologi dan birokrasi: Perspektif di era digital*. Bandung: Alfabeta.
- Handoko, W. (2020). *Inovasi pelayanan publik berbasis teknologi digital*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Heeks, R. (2001). *Reinventing government in the information age: International practice in IT-enabled public sector reform*. London: Routledge.
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2011). *Financial literacy: Implications for retirement security and the financial marketplace*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- Muluk, K. A. (2008). *Reformasi birokrasi dan kepemimpinan di Indonesia: Perspektif lokal dan global*. Malang: Bayumedia.
- Musthofa, M. (2019). *Transformasi manajemen keuangan publik melalui digitalisasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector*. New York: Addison-Wesley.
- Potrich, A. C. G., Vieira, K. M., & Kirch, G. (2018). Financial literacy and its influence on decision-making in the context of personal finance. *Journal of Financial Education*, 44(2), 1–20.
- Potrich, F. S., Oliveira, A. F., & Santos, W. B. (2018). Financial literacy in organizations: Literature review and the development of a research agenda. *Journal of Financial Studies*, 34–35.
- Risnawati. (2021). *Pengelolaan keuangan publik untuk efisiensi anggaran*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rowold, J. (2005). The effect of transformational and transactional leadership on outcomes. *Leadership & Organization Development Journal*, 26(1), 20–31.

- Siagian, S. P. (2003). *Teori dan praktek kepemimpinan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suwarno. (2019). Akuntabilitas publik dalam pengelolaan anggaran: Studi kasus di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 14(3), 129–130.
- Zimmermann, J. (2020). *Public finance and sustainability*. New York: Palgrave Macmillan.